

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Bachsun Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- D'Mutiar'as, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta.
- Ensiklopedia Indonesia (N-Z), *Negara Hukum*, N, V, W Van Hoeve.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, YBP Gajah Mada, Yogyakarta, 1968.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Rais Ahmad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1966.
- Ridwari HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi di Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1965.
- Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Soepomo, *UUD RI*, Noordhoff, Jakarta, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Tanpa pengarang, *Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas*, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1993.

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	
1. Negara Hukum.....	7
2. Asas Legalitas.....	12
3. Penegakkan Hukum.....	15
E. Metode Penelitian.....	21

BAB II : TINJAUAN PENGATURAN HUKUM PERIZINAN

A. Pengertian Izin Parkir.....	24
B. Unsur-Unsur Perizinan.....	30
C. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	36

D. Bentuk dan Isi Izin.....	38
E. Kewenangan Daerah Dalam Pengaturan Hukum Perizinan.....	42
F. Penegakan Hukum Administrasi.....	47
G. Peraturan Penyelenggaraan Perparkiran.....	56

**BAB III : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TROTOAR  
SEBAGAI LAHAN PARKIR SERTA PENEGAKKAN HUKUMNYA DI  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

A. Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Fasilitas Trotoar Di Kota Yogyakarta.....	63
B. Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan/Alih Fungsi Trotoar.....	68

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**